

# ANALISIS *PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP* SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN WISATA NEPAL VAN JAVA

Yurika Santi<sup>1</sup>, Hartuti Purnaweni<sup>1</sup>, Budi Puspo Priyadi<sup>1</sup>

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1296

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ABSTRAK

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Indonesia yang menjadi penunjang perekonomian terbesar bagi masyarakat. Pembangunan pariwisata saat ini gencar dilakukan sebagai bentuk kebangkitan setelah adanya pandemi Covid-19 yang melumpuhkan aktivitas wisata. Peran swasta sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam bentuk modal guna pembangunan pariwisata yang direalisasikan melalui skema *public-private partnership*. Desa Wisata Nepal Van Java yang menawarkan keindahan alam sebagai produk utama telah menggunakan skema *public-private partnership* sebagai upaya pengembangannya melalui kerja sama antara Pemerintah Desa Temanggung dengan Bank Rakyat Indonesia. Pemerintah Desa Temanggung ini mewakili Dusun Butuh yang merupakan lokasi spesifik wisata Nepal Van Java. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan *public-private partnership* serta mengidentifikasi faktor pendukung pelaksanaan *public-private partnership* dalam pengembangan wisata Nepal Van Java. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan *public-private partnership* berdasarkan prinsip keberhasilan kemitraan terdiri dari transparansi dan komitmen, negosiasi dengan pembahasan mengenai konsep pengembangan wisata dan *profit oriented* yang menghasilkan kesepakatan mengenai keuntungan yang akan didapatkan oleh kedua pihak, pengawasan yang dilakukan BRI kepada Pemerintah Desa Temanggung terkait progres pengembangan; komitmen pihak desa; penggunaan dana pembangunan wisata; pemeliharaan dan perawatan hasil pembangunan, serta kesetaraan peran antar kedua belah pihak. Faktor pendukung terdiri dari kemudahan dan fleksibilitas komunikasi antara Pemerintah Desa dengan BRI serta tingginya rasa kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak terhadap *partnernya*.

**Kata Kunci:** Aktor, Pengembangan Pariwisata, *Public-Private Partnership*

## **ABSTRACT**

*Tourism is one of Indonesia's leading sectors which is the largest economic support for the community. Tourism development is currently being intensively carried out as a form of revival following the Covid-19 pandemic which paralyzed tourism activities. The role of the private sector is needed to assist the government in the form of capital for tourism development which is realized through a public-private partnership scheme. The Nepal Van Java Tourism Village, which offers natural beauty as its main product, has used a public-private partnership scheme as its development effort, namely cooperation between the Temanggung Village Government and Bank Rakyat Indonesia. The Temanggung Village Government represents bt Butuh Orchard which is a specific location of Nepal Van Java tourism. This study aims to analyze the process of implementing a public-private partnership and identify supporting factors for the implementation of a public-private partnership in the effort to develop Nepal Van Java tourism. This study uses a qualitative descriptive method with data collection using interview techniques, observation, documentation. The results of the study show that the process of implementing a public-private partnership is based on the principle of partnership success consisting of transparency and commitment, negotiation with discussions on the concept of tourism development and profit oriented which result in an agreement regarding the benefits to be obtained by both parties, BRI's supervision of the Temanggung Village Government related to development progress; village commitment; use of tourism development funds; maintenance of development results, as well as equality of roles between the two parties. Supporting factors consist of ease and flexibility of communication between the Village Government and BRI as well as the high sense of trust that each party has towards its partners.*

**Keywords:** *Actors, Tourism Development, Public-private partnership*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

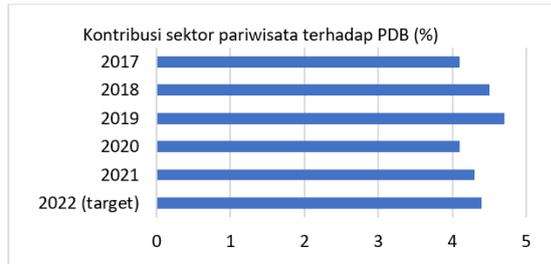
Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, budaya maupun keindahan alam yang kemudian menghasilkan berbagai macam daya tarik wisata eksotis mulai dari *adventure tourism*, *ecotourism* hingga *coastal and marine* untuk dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara (Rahman dan Warsono, 2019; Purnaweni dkk, 2019; Bakri et al, 2023; Ardiansyah dkk, 2023; Hikmah et al, 2021). Pariwisata menjadi salah satu bidang unggulan negara

Indonesia, berperan sebagai salah satu penghasil devisa negara terbesar serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan baik skala daerah maupun nasional (Nabella dkk, 2022; Indrayana, et al, 2022).

Industri pariwisata tumbuh secara cepat menjadi salah satu sektor penunjang ekonomi terbesar di seluruh dunia akibat adanya ekspansi dan diversifikasi secara berkelanjutan (Ratman, 2016). Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2022), dengan jumlah hasil devisa yang mencapai US\$ 26 miliar, industri pariwisata Indonesia menduduki urutan kedua sebagai sektor

utama penghasil devisa negara terbesar di Indonesia.

**Gambar 1. Data Kontribusi Pariwisata terhadap PDB 2017-2021**



(Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

Namun, adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2019 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia mengakibatkan kelumpuhan sementara seluruh sektor kehidupan masyarakat, tak terkecuali sektor pariwisata (Kismartini, et al, 2020). Pemerintah Indonesia pun menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang bertujuan memutus rantai penyebaran virus Covid-19 dengan konsekuensi kebijakan agar masyarakat tetap berada di rumah atau bekerja dari rumah. Akibatnya, terdapat dampak negatif berwujud gangguan pada rantai pasok global serta memberi dampak negatif terhadap sektor penunjang perekonomian, salah satunya pariwisata (Elistia, 2021; Setyawan, dkk, 2020).

Penurunan jumlah kunjungan wisatawan terutama dari mancanegara adalah dampak yang dirasakan sektor

pariwisata (Herawati, dkk, 2023). Penurunan sektor pariwisata akibat pandemi pun berdampak pada usaha UMKM dan lapangan kerja karena selama ini sektor pariwisata merupakan sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja (Sanaubar et al., 2017). Situasi pandemi menjadikan tantangan terhadap pengembangan pariwisata semakin besar akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 (Yunizar, dkk, 2022).

Pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial selama beberapa waktu mengakibatkan kebosanan bagi masyarakat, maka dikeluarkan kebijakan *new normal* sebagai langkah untuk menghadapi situasi dan kondisi pandemi menuju suatu keadaan dan adaptasi baru. Era *new normal* menjadi momentum yang paling tepat bagi dunia pariwisata untuk memulihkan aktivitas dan target awal serta membawa angin segar bagi pemulihan industri pariwisata Indonesia (Kismartini, et al, 2020; Rudiyanto & Sugiarto, 2021).

Berbagai macam daya tarik wisata baru bermunculan untuk membangkitkan kembali dunia pariwisata setelah pandemi, misalnya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bintan (Khotimah, 2021). Selain itu juga yang dilakukan oleh pemerintah Desa Butuh melalui pengembangan lokasi wisata Nepal Van

Java. Nepal Van Java merupakan sebuah wisata alam yang berada di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang mengembangkan produk pemandangan alam Gunung Sumbing dengan susunan rumah penduduk bertingkat berbentuk terasering dan warna-warni yang menyerupai pemukiman di kawasan pegunungan Himalaya Nepal (Ningrum dan Salim, 2021).

Nepal Van Java mulai menarik perhatian publik pada akhir tahun 2020 sejak keindahan alamnya viral di media sosial sehingga mulai mendatangkan banyak pengunjung baik lokal, nasional bahkan wisatawan internasional. Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai penopang perekonomian suatu daerah karena menjadi salah satu sumber PAD untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah (Normalitha, dkk, 2023). Pariwisata dengan pengembangan desa wisata diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat setempat, tetapi juga ketahanan sosial budaya bangsa dan negara (Handayani, dkk, 2023).

Konsep utama yang ditawarkan oleh wisata ini, yaitu keindahan pemandangan lereng pegunungan, spot foto dengan latar belakang suasana ala Nepal serta keindahan *sunrise* di pagi hari. Tingkat kunjungan

wisatawan di Nepal Van Java cukup tinggi, yaitu berkisar di angka 150 pengunjung pada hari biasa dan 1500 pengunjung saat akhir pekan.

**Tabel 1. Data Kunjungan Wisatawan Nepal Van Java Tahun 2022**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Kunjungan</b>
Januari	9.884
Februari	4.803
Maret	6.880
April	-
Mei	11.768
Juni	6.095
Juli	6.105
Agustus	-
September	3.487
Oktober	3.157
November	2.115
Desember	3.731
<b>Total</b>	<b>58.025</b>

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Akan tetapi, Desa Temanggung belum dapat melakukan pengembangan pariwisata Nepal Van Java secara maksimal karena adanya keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta sumber daya modal yang dimiliki. Selain itu, Desa Temanggung menjadi salah satu desa miskin di Kabupaten Magelang berdasarkan data Bappeda tahun 2022. Garis kemiskinan berkaitan dengan standar pendapatan seseorang di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat adalah melalui penggalian potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang, salah satunya melalui

pariwisata, karena Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang memiliki banyak aset pariwisata (Hardiyanti, dkk, 2022).

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk membangun destinasi wisata tanpa adanya kolaborasi dengan *stakeholder* lain (Rahman dan Warsono, 2019). Pemerintah menyadari keterbatasan yang dimiliki sehingga pemerintah mengurangi perannya dalam pembangunan dan memberikan kesempatan bagi aktor lain (Hikmah et al, 2021). Hal ini diwujudkan oleh kolaborasi yang dilakukan dengan pihak swasta melalui skema *public-private partnership*. *Public-private partnership* diharapkan dapat mendorong pengembangan pariwisata tidak hanya untuk perluasan kapasitas tetapi juga dalam pengembangan kualitas, daya saing serta produktivitas destinasi wisata.

Siswanta (2017) mengemukakan bahwa implementasi model *public-private partnership* telah meningkatkan aktivitas pariwisata kaitannya dengan produktivitas pendapatan di Museum Radya Pustaka Solo. Hal ini sejalan dengan penelitian Djabbari, dkk (2021) yang ditemukan bahwa *public private partnership* mengalami keberhasilan secara signifikan dalam pengelolaan pariwisata Kabupaten Toraja.

Nepal Van Java sebagai destinasi wisata baru yang sedang naik daun penting untuk melakukan jaringan kemitraan dengan harapan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut ditindaklanjuti melalui hubungan kerjasama antara Pemerintah Desa Temanggung dengan salah satu BUMN perbankan di Indonesia, yaitu BRI (Bank Rakyat Indonesia). Pengelolaan wisata dengan sistem kolaborasi antar *stakeholders* dapat lebih efektif, mengingat pengelolaan pariwisata akan dapat berkembang dengan baik apabila terdapat peran yang saling mendukung antar *stakeholders* (Permana, dkk, 2023).

Keterlibatan BRI dalam pengembangan wisata Nepal Van Java menjadi jawaban bagi pemerintah desa dan masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan untuk mencapai keberhasilan pengembangan wisata Nepal Van Java. Pengembangan tempat wisata apabila ditangani secara efektif dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mendorong pertumbuhan kawasan di sekitar tempat wisata tersebut (Ayuningtyas, dkk, 2023).

Dengan demikian tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis proses pelaksanaan *public-private partnership* (PPP) dalam pengembangan wisata Nepal Van Java serta untuk menganalisis faktor

pendukung pelaksanaan *public-private partnership* dalam pengembangan wisata Nepal Van Java.

## **Kerangka Teori**

### **Administrasi Publik**

Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano dalam T. Keban (2008), adalah suatu proses mengorganisir dan mengkoordinasikan sumber daya dan pegawai publik dengan tujuan untuk memformulasikan, mengimplementasikan serta mengelola berbagai keputusan dalam kebijakan publik. Paradigma pengelolaan administrasi publik yang kini dianut adalah penggunaan manajemen publik yang baru (*new public management*).

### ***New Public Management (NPM)***

Menurut Denhardt & Denhardt dalam Akbar (2015), *New Public Management (NPM)* dilihat sebagai kumpulan ide-ide dan praktik yang berupaya menggunakan pendekatan sektor swasta dan bisnis ke dalam sektor publik. Pada dasarnya, *new public management (NPM)* memiliki tujuan untuk mengubah administrasi publik sedemikian rupa sehingga bersifat seperti perusahaan namun tidak berorientasi pada laba melainkan pada penyediaan layanan yang efektif dan efisien bagi publik atau masyarakat (Akbar, 2015).

### ***Public-Private Partnership***

Peters dalam Fitriyah (2016) menjelaskan bahwa *public-private partnership* merupakan pola kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan sektor publik atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya melalui hubungan kerja sama dalam jangka panjang serta terjadi interaksi secara terus menerus antara kedua belah pihak. Hubungan ini terjalin dalam jangka panjang dalam jangka panjangserta terjadi interaksi secara terus menerus antara kedua belah pihak, dan diharapkan menguntungkan kedua belah pihak (Setyawati dan Purnaweni, 2018).

### **Fokus Penelitian**

Proses pelaksanaan *public private partnership* pengembangan wisata Nepal Van Java dianalisis menggunakan empat prinsip tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kemitraan antara pemerintah dan swasta (Leondhardt, 2007), yaitu:

1. **Transparansi dan Komitmen**

Transparansi merupakan jaminan bagi setiap pihak atas akses dan kebebasan untuk memperoleh informasi. Gejala yang diamati adalah pengetahuan kedua pihak akan maksud dan tujuan serta manfaat dan resiko PPP, pengelolaan keuangan, dan kebebasan akses informasi.

Komitmen merupakan keterikatan atau bentuk dedikasi suatu pihak untuk

melakukan sesuatu. Dilihat melalui bentuk tanggung jawab kedua pihak terhadap pelaksanaan program.

#### 2. Negosiasi

Merupakan proses tawar menawar atau berunding oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan. Gejala yang diamati berkaitan dengan aktor pelaksana negosiasi, waktu pelaksanaan, isi negosiasi, dan hasil pelaksanaan negosiasi.

#### 3. Pengawasan

Merupakan kegiatan pemantauan untuk mengatur pelaksanaan proses kemitraan. Gejala yang diamati terdiri dari tahapan pelaksanaan PPP, aktor dan waktu pelaksanaan pengawasan, serta bentuk pengawasan yang dilakukan.

#### 4. Kesetaraan Peran

Merupakan keadaan yang menunjukkan kedudukan yang sama antar beberapa pihak. Gejala yang diamati berupa kedudukan, pembagian hak dan kewajiban, partisipasi dan struktur organisasi.

Artikel ini juga menganalisis mengenai faktor pendukung pelaksanaan *public private partnership* pengembangan wisata Nepal Van Java. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012) (dalam Yuniningsih (2018), terdapat beberapa hal yang dapat menjadi faktor pendukung dalam proses kolaborasi antar pihak, terdiri dari:

1. Komunikasi, merupakan proses koordinasi dan kerjasama baik secara lisan maupun tulisan untuk mencapai tujuan yang sama. Gejala yang diamati berupa seberapa intens pelaksanaan komunikasi, media komunikasi dan bentuk komunikasi yang efektif.

2. Kepercayaan, merupakan keyakinan satu aktor terhadap aktor lain dalam menjalin hubungan kerjasama.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Situs penelitian ini adalah di Wisata Nepal Van Java Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mendapatkan informan kunci yaitu Kepala Dusun Butuh selaku penanggung jawab Wisata Nepal Van Java. Selain itu menggunakan teknik *snowball sampling* untuk penentuan informan selanjutnya yaitu pihak swasta BRI Kantor Cabang Magelang yang diwakili oleh Manager Bisnis Mikro BRI dan Staff Sarana Penunjang Operasional. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan informan serta hasil observasi di lapangan dan data sekunder berupa penelitian terdahulu.

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara kepada Kepala Dusun Butuh selaku pihak publik serta wawancara kepada Manager Bisnis Mikro BRI dan Staff Sarana Penunjang Operasional BRI selaku pihak swasta, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan 4 tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kualitas data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Proses Pelaksanaan *Public-Private Partnership* Pengembangan Wisata Nepal Van Java**

Proses pelaksanaan *public-private partnership* dilakukan berdasarkan pada empat prinsip keberhasilan, yaitu transparansi dan komitmen, negosiasi, pengawasan, dan kesetaraan peran. (Leondhardt dalam (Fitriyah, 2016; Indrayana et al, 2022). Masing-masing prinsip memiliki fungsi yang penting agar kemitraan dapat berhasil.

#### a. Transparansi dan Komitmen

Transparansi didasarkan pada kebebasan arus informasi dan aksesnya oleh semua pihak yang terlibat dan berkepentingan, sementara itu perhatian, tanggung jawab, dan penciptaan gagasan merupakan sebuah bentuk dari komitmen

(Hendratmi, dkk, 2017). Prinsip transparansi menjelaskan bahwa untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kemitraan, maka setiap pihak harus dapat mengakses segala informasi yang berkaitan dengan program kemitraan seperti informasi mengenai tujuan, manfaat dan resiko, kebijakan serta berbagai pengelolaan di dalamnya agar program dapat berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian (Sari, dkk, 2023) yang mengatakan bahwa selain menjadikan kemitraan berjalan lancar, transparansi juga berupaya mencegah adanya permasalahan maupun menyelesaikan masalah, serta meraih kepercayaan pihak lain.

Prinsip transparansi didukung oleh adanya komitmen yang dilakukan oleh pihak yang terlibat sebagai bentuk dedikasinya terhadap pelaksanaan program kerja sama untuk mencapai keberhasilan. Proses pelaksanaan program kemitraan antara Pemerintah Desa Temanggung dengan BRI telah menggunakan prinsip transparansi di dalamnya. Masing-masing pihak telah mengetahui maksud dan tujuan dari program kerja sama *public-private partnership*, yaitu bertujuan untuk melakukan pengembangan sarana dan prasarana wisata beserta sumber daya manusia yang berada di dalamnya serta untuk *branding* BRI.

Kedua belah pihak juga secara transparan telah mengetahui manfaat dan resiko yang timbul. Manfaat adalah untuk memberikan kemudahan modal untuk menghasilkan sarana dan prasarana wisata baru yang menarik sehingga destinasi wisata Nepal Van Java semakin bervariasi dan tidak monoton yang kemudian berkorelasi positif dengan peningkatan wisatawan.

Manfaat lain yang dihasilkan adalah berupa kemudahan penyertaan modal bagi setiap masyarakat yang ingin melakukan pengembangan usaha melalui KUR BRI. Sementara itu, kedua belah sama-sama berpendapat bahwa sejauh ini tidak muncul resiko yang berarti dalam pelaksanaan kerja sama *public-private partnership* pengembangan wisata Nepal Van Java.

Kemudian, transparansi pengelolaan keuangan harus dilakukan apabila ingin mencapai keberhasilan. Pengelolaan keuangan dalam pengembangan wisata Nepal Van Java dilakukan oleh pihak desa sebagai pihak yang lebih mengetahui potensi apa saja yang akan dikembangkan. Pihak BRI sebagai pihak swasta hanya berperan untuk memberikan bantuan modal yang diberikan secara berkala sesuai dengan pembangunan yang saat itu akan dilakukan. Namun, BRI tetap mengetahui penggunaan anggaran pembangunan melalui SPJ yang dibuat oleh pihak desa

disertai dengan bukti-bukti pembangunan. Pengelolaan keuangan secara transparan oleh kedua pihak melalui laporan realisasi, seperti yang terlihat pada tabel-tabel berikut:

**Tabel 2. Laporan Nominal Pengembangan Wisata Nepal Van Java**

No	Jenis Pengembangan	Nominal (Rupiah)
1.	Rabat Beton Anak Tangga 1	7.508.000
2.	Paving Parkiran	80.000.000
3.	Toilet Basecamp	9.864.500
4.	Keramik dan Paving Taman Depok	11.921.000
5.	CCTV Basecamp	4.500.000
6.	Penataan dan Branding	33.913.500
7.	Keramik Masjid	54.491.000
8.	Pavingisasi Jembatan Kaca	5.900.000
9.	Rabat Beton Anak Tangga 2	16.985.000
10.	Gapura Desa	30.500.000
11.	Toilet Gedung Menara Pandang	6.353.000
12.	Closet Duduk	2.000.000
13.	Toilet Musholla RT 4	7.758.000
14.	Kolom Jalan RT 5	4.009.000
15.	Langsir Besi Jembatan Kaca	600.000
16.	Pembersihan Lokasi Jembatan Kaca	845.000
17.	Branding Letter BRI	12.000.000
18.	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat	17.241.000

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

**Tabel 3. Laporan Nominal Pengembangan Wisata Nepal Van Java**

No	Jenis Pembangunan	Nominal (Rupiah)
1.	Toilet	89.897.000
2.	<i>Vertical Garden</i>	243.900.000
3.	Gedung Serbaguna	249.800.000
4.	Vendor pembangunan	583.597.000
5.	Pajak	110.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.001.086.000</b>

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Kebebasan akses informasi menunjukkan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan. Informasi terkait kebijakan dan kegiatan pemerintah juga harus tersampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar tidak terjadi miskomunikasi (Setiawan dan Warsa, 2018). Kebebasan akses informasi antara Desa Wisata Nepal Van Java dan BRI telah terjalin melalui pemberian informasi secara *update* oleh BRI kepada pihak desa apabila terdapat informasi-informasi baru dan penting. Timbal balik oleh pihak desa kepada BRI dilakukan melalui pemberitahuan informasi dan laporan secara *update* mengenai perkembangan wisata Nepal Van Java dengan komunikasi kepada pihak BRI. Hal ini didukung oleh penggunaan media sosial instagram melalui *official* akun @nepal\_van\_java yang berisi destinasi wisata beserta perkembangan di dalamnya.

Selain transparansi, komitmen juga penting dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Komitmen dalam setiap organisasi yang bermitra tentu diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Jika salah satu dari organisasi yang bermitra tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan tentu kemitraan tersebut akan mengalami kegagalan (Setiawan dan Warsa, 2017).

Komitmen BRI dalam kerja sama pengembangan wisata Nepal Van Java adalah mengawal penggunaan dana pengembangan serta mengawal pemeliharaan sarana dan prasarana wisata baru dengan tujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana tanpa membuang anggaran. Sementara itu, komitmen yang dilakukan oleh pihak, yaitu komitmen untuk tetap setia bekerja sama dengan BRI di tengah banyaknya pihak yang menawarkan kerjasama.

#### b. Negosiasi

Proses negosiasi dilakukan untuk membahas gambaran pelaksanaan program yang akan dilaksanakan. Proses negosiasi antara pemerintah Desa dengan BRI adalah pembahasan mengenai gambaran potensi yang dimiliki oleh wisata Nepal Van Java.

### **Gambar 1. Gambaran Potensi Wisata Nepal Van Java**



Sumber: [https://instagram.com/nepal\\_van\\_java](https://instagram.com/nepal_van_java)

Negosiasi lainnya untuk membahas *profit oriented* yang berkaitan dengan penggunaan produk BRI berupa pinjaman

yang akan didistribusikan kepada masyarakat Nepal Van Java. Penggunaan produk pinjaman tersebut akan meningkatkan profit dari BRI setiap bulannya. Dilakukan juga negosiasi mengenai konsep dan gagasan pengembangan wisata oleh kepala dusun selaku wakil dari pihak pemerintah serta proses dan prosedur pencairan dana yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan pengembangan wisata Nepal Van Java.

Hasil negosiasi adalah berupa disetujuinya program kerjasama *public-private partnership* antara pemerintah Desa Temanggung dengan BRI serta keputusan yang menguntungkan bagi desa wisata Nepal Van Java melalui adanya pengembangan pembangunan dan kemudahan modal bagi masyarakat serta keuntungan bagi BRI melalui peningkatan penggunaan produk BRI oleh masyarakat sekitar Nepal Van Java.

Hasil negosiasi sudah diterapkan dan dilakukan oleh kedua belah pihak, ditandai dengan pembangunan sarana dan prasarana semaksimal mungkin untuk perbaikan dan pembangunan sarana umum serta pembangunan atraksi wisata baru di Nepal Van Java dengan menggunakan anggaran dari BRI.

### c. Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kerjasama yang ditujukan untuk mengatur pelaksanaan kerja sama oleh pihak-pihak yang terlibat (Pradana, 2020). Pengawasan pembangunan wisata Nepal Van Java dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu Pemerintah Desa Temanggung dan BRI. Pengawasan dilakukan terhadap semua tahapan pelaksanaan *public-private partnership*.

Tahapan pelaksanaan program kerja sama pengembangan wisata Nepal Van Java dimulai dari pengamatan potensi desa wisata untuk mengetahui kelayakan desa dalam menerima modal yang diberikan, dilanjutkan tahap pengajuan proposal untuk pencairan dana BRI. Tahap selanjutnya adalah melakukan pengembangan infrastruktur dasar pendukung wisata seperti gapura, penunjuk jalan, toilet, tempat parkir, dan masjid yang merupakan fasilitas umum penting dan sering dicari oleh pengunjung yang kemudian dilanjutkan untuk tahapan pengembangan atraksi wisata Nepal Van Java.

Pengawasan dalam pelaksanaan *public-private partnership* pengembangan wisata Nepal Van Java dilakukan oleh pihak swasta, yaitu BRI selaku pemberi modal. Pengawasan dilakukan dalam hal progres pengembangan, komitmen pihak desa, penggunaan dana pembangunan wisata,

serta pemeliharaan dan perawatan hasil pembangunan.

*Monitoring* perkembangan wisata menjadi hal yang perlu dilakukan oleh pihak swasta untuk memastikan spek dan kondisi pembangunan serta sejauh mana bantuan modal telah dipergunakan. Pengawasan secara berkala oleh BRI ditujukan untuk kelompok masyarakat yang mendapatkan penyertaan modal usaha sebagaimana pengawasan bank terhadap nasabah peminjam.

Pihak pemerintah desa juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan wisata yang dikelola oleh internal masyarakat Nepal Van Java dan Karang Taruna untuk meminimalisir terjadinya tindak kecurangan khususnya berkaitan dengan keuntungan hasil wisata. Adanya pengawasan dapat mendeteksi kekurangan dan kesalahan cukup awal agar memungkinkan pemerintah desa melakukan perbaikan dan peningkatan yang cepat (Ayuningtyas, dkk, 2023).

#### d. Kesetaraan Peran

Kesetaraan peran merupakan persamaan kedudukan dan wewenang satu sama lain. Kesetaraan peran dalam pelaksanaan kerja sama *public-private partnership* pengembangan wisata Nepal Van Java tercipta melalui pembagian peran masing-masing pihak. Pembuatan

keputusan dan kesepakatan dilakukan secara bersama-sama antara pihak pemerintah desa dengan BRI melalui pernyataan pendapat.

Pemerintah memiliki kedudukan untuk membuat kebijakan dan melakukan inovasi bagi desa yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah adalah untuk mengawasi pihak ketiga atau vendor pembangunan, melakukan *service* pariwisata, serta pemeliharaan infrastruktur yang telah dibuat. Pemerintah melibatkan Pokdarwis untuk melakukan tugas pengelolaan wisata seperti penjagaan tempat parkir, penjagaan loket tiket, serta pengaturan ojek wisata agar tidak timbul permasalahan internal.

Pihak swasta BRI berkedudukan sebagai pemberi modal untuk pembangunan wisata serta pemberi layanan produk bank kepada masyarakat melalui penyertaan modal untuk meningkatkan usaha wisata. BRI memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap keberjalanan kegiatan pembangunan dan pengembangan wisata Nepal Van Java agar dapat menghasilkan keuntungan bagi kedua pihak yang bekerja sama.

Kesetaraan peran dalam pengembangan wisata Nepal Van Java juga dapat dilihat melalui pembagian keuntungan kedua belah pihak. Keuntungan pihak pemerintah

adalah tercukupinya modal untuk melakukan pengembangan wisata Nepal Van Java baik dalam hal atraksi maupun amenitas wisata. Sementara itu, pihak bank mendapat keuntungan dari peningkatan penggunaan produk bank berupa simpanan dan pinjaman serta QRIS BRI kepada

masyarakat pelaku usaha. Keuntungan tiket dan parkir didistribusikan secara merata untuk pengembangan Desa Temanggung.

**Tabel 4. Pembagian Keuntungan Tiket Wisata Nepal Van Java**

No	Kegiatan	Besaran (%)
1.	Operasional	30
2.	Dusun Butuh	10
3.	Pokdarwis	10
4.	Pemeliharaan	10
5.	Desa Temanggung	10
6.	Karang Taruna Desa	10
7.	Desa Penyangga	10
8.	Asuransi	10

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Nominal pembagian keuntungan diambil dari hasil penjualan tiket wisata Nepal Van Java. Pembagian keuntungan tidak hanya untuk Dusun Butuh, tetapi seluruh lembaga desa agar seluruh pihak dapat merasakan kebermanfaatannya dari adanya wisata.

**Tabel 5. Pembagian Hasil Keuntungan Wisata Nepal Van Java Tahun 2022**

NO	SUB PEMBAGIAN	NOMINAL
1.	Operasional	Rp. 174.075.000
2.	Dusun Butuh	Rp. 58.025.000
3.	Pokdarwis	Rp. 58.025.000
4.	Pemeliharaan	Rp. 58.025.000
5.	Desa Temanggung	Rp. 58.025.000
6.	Karang Taruna Desa	Rp. 58.025.000
7.	Desa Penyangga	Rp. 58.025.000
8.	Asuransi	Rp. 58.025.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 580.250.000</b>

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Penelitian di atas menunjukkan bahwa proses pelaksanaan *public-private partnership* dengan berdasar pada empat prinsip kemitraan telah berhasil dilakukan. Keberhasilan ini ditandai dengan adanya perkembangan pada wisata Nepal Van Java baik secara fisik berupa peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dasar dan pendukung wisata, maupun secara non fisik berupa perkembangan sumber daya manusia pengelola wisata. Pelaksanaan skema *public-private partnership* ini tentu didukung oleh kerjasama dan hubungan yang baik antara Pemerintah Desa Temanggung dengan pihak BRI sehingga segala prinsip kemitraan dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam rangka mencapai keberhasilan.

## **Faktor Pendukung Pelaksanaan *Public-Private Partnership* Pengembangan Wisata Nepal Van Java**

### 1. Komunikasi

Interaksi antara pihak pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan program kerja sama *public-private partnership* terjalin melalui sebuah komunikasi. Komunikasi menjadi salah satu faktor pendukung karena komunikasi menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Desa dengan BRI. Komunikasi antar pihak dilakukan secara rutin dalam rangka *update* informasi pengembangan wisata. Komunikasi secara rutin dilakukan menggunakan media *online whatsapp* dan kadangkala menggunakan *zoom meeting*. Komunikasi juga dilakukan secara langsung oleh pemerintah desa kepada BRI pada setiap kunjungan BRI ke Nepal Van Java dalam rangka pengecekan dan peninjauan pelaksanaan pembwngunan wisata Nepal Van Java.

Kendala dalam proses komunikasi timbul dari faktor eksternal berupa keterbatasan jaringan karena lokasi Nepal Van Java yang berada di kaki Gunung Sumbing. Namun, kendala tersebut sudah diatasi dengan cara pemasangan kabel jaringan wifi pada wilayah tersebut untuk mempermudah komunikasi.

Proses komunikasi juga dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta kepada

masyarakat. Pemerintah Desa Temanggung melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam bentuk sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan kesiapan masyarakat terkait pariwisata. Menurut penelitian (Wazan, dkk, 2020), kesiapan dari masyarakat lokal memengaruhi laju pertumbuhan dari objek wisata itu sendiri.

Komunikasi oleh pihak BRI lebih bersifat pemberdayaan yang mengajarkan masyarakat akan hal-hal baru dalam dunia wisata seperti *digital marketing, digital tourism*, pengelolaan wisata yang tepat, serta pendirian usaha di sekitar wisata. Pemberdayaan diawali dengan penciptaan suasana maupun iklim yang membuat berkembangnya potensi masyarakat (Handayani, dkk, 2023).

BRI juga intens melakukan komunikasi kaitannya dengan pinjaman KUR yang akan diberikan oleh BRI kepada masyarakat sebagai modal untuk mengembangkan usaha dan jasa wisata. Pemberdayaan masyarakat secara konseptual diartikan sebagai upaya peningkatan harkat dan martabat masyarakat dari kondisi saat ini yang tidak mampu keluar dari perangkap keterbelakangan (Hardiyanti, dkk, 2022).

Komunikasi yang terjalin antara pihak Desa Wisata Nepal Van Java berjalan dengan efektif ditandai dengan tidak

adanya kendala atau hambatan secara serius yang mengganggu keberjalanan proses komunikasi tersebut. Komunikasi yang terjalin juga sudah memberikan pemahaman terkait pengembangan wisata Nepal Van Java sehingga masyarakat lebih terbuka dan ikut serta dalam kegiatan pariwisata melalui berbagai kegiatan usaha wisata seperti warung makan, homestay, ojek wisata, dan lainnya. Interaksi melalui komunikasi antara kedua belah pihak akan memunculkan ide, gagasan, dan masukan untuk pengembangan pariwisata (Destiana, dkk, 2020).

**Tabel 6. Daftar Jenis Usaha Masyarakat Desa Wisata Nepal Van Java**

NO	JENIS USAHA	JUMLAH	RATA-RATA PENDAPATAN
1.	Ojek Wisata	215	Rp. 1.500.000
2.	Warung Kelontong	20	Rp. 2.000.000
3.	Warung Kopi	5	Rp. 1.500.000
4.	Pedagang Kaki Lima	12	Rp. 1.500.000
5.	Warung Makan	4	Rp. 2.500.000
6.	Homestay	10	Rp. 2.000.000

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

## 2. Kepercayaan

Kepercayaan menjadi landasan pelaksanaan yang akan menghasilkan keberhasilan proses kolaborasi *stakeholders*. Kepercayaan antar pihak memberikan kemudahan dalam pencapaian tujuan. Waayers (dalam Destiana, dkk, 2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa keberhasilan

kolaborasi bergantung pada aktivitas membangun kepercayaan, mengakui saling ketergantungan, menghasilkan visi dan tujuan bersama dan komitmen di antara para *stakeholders* dalam proses yang terstruktur.

Kepercayaan BRI kepada pemerintah desa dilatarbelakangi oleh pengetahuan akan kredibilitas dan karakter penanggung jawab wisata Nepal Van Java, yaitu Kepala Dusun Butuh. Kepercayaan ini timbul melalui hubungan komunikasi yang baik dan berlangsung lama. Kepercayaan juga timbul melalui potensi wisata yang apabila dikembangkan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Sementara itu, kepercayaan dari pemerintah desa kepada BRI timbul dari rasa timbal balik yang harus dilakukan oleh Desa Wisata Nepal Van Java atas bantuan modal yang diberikan. Kepercayaan diwujudkan dalam bentuk kesetiaan untuk bekerja sama dengan BRI di tengah banyaknya pihak yang menawarkan untuk melakukan kerja sama serta kemauan masyarakat untuk mendapatkan penyertaan modal dengan skema pinjaman kepada BRI. Kepercayaan diwujudkan juga melalui pelaksanaan pengembangan wisata Nepal Van Java yang dilakukan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai hasil yang optimal. Kepercayaan yang dibangun secara baik dibutuhkan untuk membangun sinergitas

antar stakeholder dalam pelaksanaan program (Dewi, dkk, 2023).

Strategi pariwisata berkelanjutan membutuhkan praktik membangun konsensus kolaboratif dan inklusif yang di dalamnya mempertimbangkan dimensi kepercayaan. Kepercayaan dipupuk oleh komitmen didukung dengan berbagi informasi dan keahlian oleh para pihak untuk mengkonsolidasikan hubungan. (Destiana, dkk, 2020).

Komunikasi dan kepercayaan menjadi satu kesatuan yang penting dalam pelaksanaan kerjasama karena pada dasarnya menyatukan dua pihak yang memiliki berbagai perbedaan bukanlah hal yang mudah sehingga komunikasi dan kepercayaan sangat dibutuhkan untuk mengatasi perbedaan tersebut. Dalam penelitian ini, komunikasi dan kepercayaan telah berjalan secara baik antara Pemerintah Desa Temanggung dengan BRI sehingga menciptakan hubungan yang harmonis yang menguntungkan kedua belah pihak sehingga proses pelaksanaan *public-private partnership* dapat berjalan dengan baik tanpa konflik sehingga menghasilkan pengembangan wisata Nepal Van Java.

## KESIMPULAN

Secara umum, pelaksanaan skema *public-private partnership* yang terjalin antara Pemerintah Desa Temanggung

dengan BRI sebagai upaya pengembangan wisata Nepal Van Java sudah terlaksana dengan cukup baik. Proses pelaksanaan *public-private partnership* dianalisis menggunakan empat prinsip keberhasilan kemitraan yang terdiri dari transparansi dan komitmen, negosiasi, pengawasan, dan kesetaraan peran. Transparansi dan komitmen terwujud melalui pengetahuan akan maksud dan tujuan serta manfaat dan resiko PPP, keterbukaan pengelolaan keuangan, dan kebebasan akses informasi telah dilakukan dan diwujudkan oleh kedua belah pihak.

Negosiasi dilakukan untuk melakukan pembahasan *profit oriented* yang menghasilkan kesepakatan keuntungan yang akan didapatkan oleh kedua pihak serta negosiasi untuk membahas konsep pengembangan wisata yang menghasilkan kesepakatan proses dan prosedur pencairan dana sebagai pembiayaan wisata.

Prinsip pengawasan sudah dilakukan oleh masing-masing pihak sesuai wewenangnya yaitu BRI mengawasi segala hal mengenai pembangunan wisata dan pemerintah desa mengawasi kegiatan internal. Prinsip kesetaraan peran telah terwujud melalui pembagian kedudukan, peran dan tugas yang sesuai dengan kapasitas pemerintah dan swasta. Peran

pemerintah desa dibantu oleh Pokdarwis sebagai pengelola wisata.

Faktor yang mendukung pelaksanaan *public private partnership* pengembangan wisata Nepal Van Java adalah adanya komunikasi dan kepercayaan yang baik antara Pemerintah Desa Temanggung dengan BRI. Komunikasi terjalin secara efektif dan dua arah pada masing-masing pihak serta turut melibatkan masyarakat sekitar. Komunikasi yang baik akan menghasilkan kepercayaan dan tidak akan ada kepercayaan tanpa adanya komunikasi.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan peneliti antara lain:

1. Diharapkan keterlibatan *stakeholders* pemerintah yang lain seperti Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat Desa Wisata Nepal Van Java.
2. MoU secara tertulis perlu dibuat antara Pemerintah Desa Temanggung dan BRI sebagai landasan program kerja sama dengan isi hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk

meminimalisir adanya tindakan penyimpangan.

3. Sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan oleh Pemerintah Desa Temanggung maupun BRI tentang pariwisata sebaiknya digiatkan kembali agar masyarakat semakin paham terhadap pengelolaan dan pelayanan wisata yang baik sehingga dapat memberi kesan positif bagi para wisatawan setelah berkunjung ke Nepal Van Java.
4. Diharapkan Pemerintah Desa Temanggung dan BRI juga meningkatkan keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan wisata Nepal Van Java tidak hanya untuk sektor usaha dan jasa wisata tetapi juga terlibat dalam pemberian inovasi dan masukan untuk pengembangan wisata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. 2015. Penerapan Prinsip Prinsip New Public Management Dan Governance Dalam Reformasi Administrasi. *Reformasi*, 5(2), 453-469.
- Ardiansyah, F. W., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2023). Analisis Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 741-756.

- Ayuningtyas, D., Lestari, H., & Rostyaningsih, D. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 13-31.
- Bakri, S., Utami, M. P., Ashaf, A. F., Purnaweni, H., & Windah, A. (2023). Prediction Model of Eco-tourism Visitor's Intention to Pahawang Island, Lampung Province, Indonesia. *KnE Social Sciences*, 163-177.
- Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 132-153.
- Dewi, P. R., Dwimawanti, I. H., & Djumiarti, T. (2023). Sinergitas Stakeholder Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3).
- Djabbari, Muh. Hidayat, Alwi, and Saddam Husain Tamrin. 2021. "Implementasi Public Private Partnership Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Toraja Utara." *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik* 7(1): 1-13. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/13203>.
- Elistia, E. (2021). Perkembangan dan Dampak Pariwisata di Indonesia Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)*, 1(1).
- Fitriyah, Faridah. 2016. "Model Public Private Partnership Dalam Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Air Bersih Di PDAM Kabupaten." *Kebijakan dan Manajemen Publik* 4(April).
- Handayani, A. V., Maesaroh, M., & Widowati, N. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Wisata Cikakak Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(4), 62-78.
- Hardiyanti, K., Purnaweni, H., & Sundarso, S. (2022). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Sektor Pariwisata Balkondes Giritengah di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(1), 49-60.
- Hendratmi, H., Mulyadi, J. M. V., & Widiastuti, T. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Komitmen Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 3(2), 76-93.
- Herawati, A. R., Widowati, N., & Astuti, R. S. (2023). Inovasi Pelayanan Publik Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bintan. *Jurnal Good Governance*, 80-91.
- Hikmah, N, Larasati, E, Purnaweni, H, Yuniningsih, T, Collaboration of stakeholders in the development of ecotourism of Tangkahan village in Pulang Pisau regency of Central Borneo, Management and Entrepreneurship: Trends of Development, Vol 2(16), 2021, DOI: <https://doi.org/10.26661/2522-1566/2021-1/16-03>; <https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/279>
- Indrayana, Y., Susilowati, I., Purnaweni, H., & Yuniningsih, T. (2022). Policy Development Corridor Of Karangwangi As Cultural Tourism Urban In Cirebon City. *Asian journal*

- of management sciences & education, 11(1), 45-56.
- Keban, Yeremias T. 2008. "Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep." *Teori dan Isu, Yogyakarta: Gava Media*.
- Kismartini, K, Purnaweni, H, Djumiarti, T, Khotimah N, *A Change in Tourism Management: New Normal Era in Riau Islands Province*, 2020, <https://eudl.eu › pdf › eai.9-10-2020.2304726>
- Nabella, A. R., Pramudita, A. G., Hafizha, B. A., Wahyudi, R. T., Ayuningtyas, T. S., Kismartini, K., & Purnaweni, H. (2022). Pengembangan Potensi Pantai Glagah sebagai Lokawisata Unggulan di Kabupaten Kulon Progo. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 1(4), 270-276.
- Ningrum, F. A. S., dan Salim, M. N., 2021. Peran Sosial Media Terhadap Daya Tarik Wisata "Nepal Van Java". *Jurnal Pariwisata Pesona*, Vol. 6, No. 2, hal: 116-125.
- Normalitha, L. R., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2023). Strategi Pengembangan Wisata Berbasis Ecotourism Di Agrowisata Kebun Teh Jamus Kabupaten Ngawi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 834-850.
- Permana, R. G., Afrizal, T., & Subowo, A. (2023). Analisis Kolaborasi Dalam Pengelolaan Desa Wisata: Kasus Di Desa Nganjat Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 667-679.
- Pradana, A. E., Astuti, R. S., & Priyadi, B. P. (2020). Public-Private Partnership in the Framework of Waste Management into Electrical Energy in Jatibarang Landfill, Semarang City. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 3(2), 130-144.
- Pratiwi, Nina Galih, and Hardi Warsono. 2018. "Analisis Public-Private Partnership dalam Pengembangan Objek Wisata Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan." *Journal of Public Policy and Management Review* 7(2).
- Purnaweni, H., Kismartini., & Lestari, H. (2019, October). Potential For The Development Of Ecotourism Of Begadung Island, Bangka Regency. In *International Conference on Maritime and Archipelago (ICoMA 2018)* (pp. 188-190). Atlantis Press.
- Rahman, A. Z., & Warsono, H. (2019). Kolaborasi triple helix dalam pembangunan wisata bahari di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 7(1), 25-31.
- Ratman, Dadang Rizki. 2016. Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Pariwisata "Akselerasi Pembangunan Kepariwisata Dalam Rangka Pencapaian Target 12 Juta Wisman dan 260 Juta Wisnus 2016" *Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas 2016 - 2019*.
- Rudiyanto, Andreas & Eko Sugiarto. (2021). "NEW NORMAL" SEBAGAI MOMENTUM KEBANGKITAN EKOWISATA: Sebuah Kajian Awal tentang Daya Dukung Lingkungan Pascapandemi Covid-19. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 5(2), 74-81.
- Safi, Borhanudin Achmad, dan Mas Roro Lilik Ekowanti. (2022). Kemitraan Pemerintah dan Swasta Tentang Pengelolaan Sampah Menjadi Tenaga Listrik dengan Program Zero Waste City di Pembangkit Listrik Tenaga Sampah/Pltsa Benowo, Surabaya, *Jurnal Aplikasi Administrasi*, Vol. 25,

- No. 1, hal: 39-44.
- Sanaubar, G., Hidayat, W., & Kusuma, H. (2017). Pengaruh Potensi Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perhotelan Di 9 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(3), 324– 339.
- Sari, E. R. Y. (2023). Kemitraan Corporate Social Responsibility Pt Phapros Dengan Taman Pelangi Mardi Utomo (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro).
- Setiawan, T., dan Novia Warsa. (2018). Dileme *Public Sosial Private Partnership* dalam Penyediaan Infrastruktur Publik. *Journal of Public Administration and Local Government*, 2(1).
- Setyawan, F. E. B., & Lestari, R. (2020). Challenges of stay-at-home policy implementation during the Coronavirus (Covid-19) pandemic in Indonesia. *Jurnal Administrasi Kesehatan*.
- Setyawati, D. A., & Purnaweni, H. (2018). Implementasi Kebijakan Kerjasama Pemerintah Dengan Swasta (Public Private Partnership) dalam Pengelolaan Sampah di Tpa Jatibarang (Studi Kasus Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati). *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4), 227-237.
- Siswanta, and Aries Tri Haryanto. 2017. “Public Private Partnership Dalam Pengelolaan Museum Radya Pustaka Surakarta.” *Mutiara Madani* 5(2): 25– 50.
- Wazan, S., Astuti, R. S., Kismartini, K., & Afrizal, T. (2020). Pengelolaan Kawasan Wisata Suku Anak Dalam Berbasis Kearifan Lokal. *PERSPEKTIF*, 9(2), 418-427.
- Yuniningsih, Tri. 2018. Analisis Jaringan Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Kota Semarang. Disertasi. FISIP, DAP, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Yunizar, I. M., Kismartini, K., & Rahman, A. Z. (2022). Mengembangkan Wisata Alam Posong Melalui Pendekatan Brand Hexagon Di Kabupaten Temanggung. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 215-231.
- Kememparekraf. (2022, 28 Desember). Pendapatan Devisa Negara Melejit pada 2022, diakses pada 30 Januari 2023 melalui <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/pendapatan-devisa-pariwisata-indonesia-melejit-pada-2022>